



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0089 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN ORIENTASI LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran, meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, dan sebagai bentuk desain pembelajaran, maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai acuan untuk penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
13. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.05/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
15. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

- 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
17. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72062);
 18. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
 19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
 20. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
 21. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN ORIENTASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Penetapan sebagaimana dimaksud tertuang dalam lampiran-lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Apabila Kurikulum Pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak relevan pada masa yang akan datang, maka akan dilakukan revisi dan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0089 Tahun 2024
Tanggal 22 Juli 2024

KURIKULUM PELATIHAN ORIENTASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. NAMA PELATIHAN

Pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

B. RUMPUN PELATIHAN

Pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pelatihan teknis pada rumpun kompetensi teknis.

C. DESKRIPSI SINGKAT

Kondisi transportasi di DKJ (Daerah Khusus Jakarta) semakin hari dirasa semakin tidak bersahabat, dikarenakan di setiap titik baik ruas jalan maupun persimpangan terjadi kemacetan yang dirasa semakin parah. Kecepatan kendaraan di beberapa ruas jalan utama pada saat jam sibuk pagi maupun jam sibuk sore tidak lebih dari 30 km/jam, tingginya waktu tundaan dan panjang antrian di beberapa persimpangan juga dirasa semakin lama dan semakin panjang. Polda Metro Jaya (2024) menyatakan bahwa indeks kemacetan di Kota Jakarta sudah melebihi 50% prakiraan tersebut bisa jadi mendekati atau bahkan melebihi situasi pada tahun 2019 dengan skor indeks kemacetan mencapai 53%.

Pada tahun 2022 Kota Jakarta menempati peringkat ke-29 berdasarkan lama waktu perjalanan, untuk menempuh jarak 10 km dibutuhkan waktu 23 s.d 25 menit di jam puncak pagi, sementara jam puncak sore dibutuhkan waktu 29 s.d 32 menit. Beberapa antisipasi terhadap kemacetan tersebut beberapa kebijakan seperti aturan ganjil-genap, penambahan moda transportasi publik, hingga peningkatan infrastruktur jalan yang juga melibatkan kuncuran dana dari pemerintah pusat. Hanya saja, sejumlah langkah antisipasi tersebut belum membuahkan hasil secara maksimal, kemacetan terus terjadi dan tampaknya semakin sulit untuk diatasi.

Beberapa faktor penyebab kemacetan di Kota Jakarta, salah satunya adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan. BPS DKI Jakarta (2022) menyatakan bahwa selama tahun 2018 s.d 2022 pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Jakarta tumbuh 4,1% per tahun.

Pada 2022, tercatat terdapat 26,4 juta kendaraan bermotor yang terdiri dari sepeda motor sebanyak 17,3 juta, mobil penumpang 3,8 juta, serta sisanya sekitar 5 juta unit terdiri dari bus dan truk.

BPS DKI Jakarta (2024) menyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2024 berjumlah 11,34 juta jiwa, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap mobilitas penduduk Kota Jakarta dalam melakukan perjalanan. Jumlah perjalanan masuk dan keluar dari dan ke Kota Jakarta tentunya akan semakin besar jika mempertimbangkan perjalanan komuter dari kota penyangganya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk menurunkan tingkat kemacetan, adalah:

- a. Telah dilaksanakan penataan stasiun KRL yang terintegrasi dengan Transjakarta juga MRT/LRT dan perbaikan sistem integrasi angkutan umum melalui Program JakLingko, sehingga mobilitas masyarakat termasuk aksesibilitas pejalan kaki serta integrasi antar moda menjadi teratur dan tertata;
- b. Peningkatan kualitas dan area jangkauan angkutan umum di DKI Jakarta sehingga minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum menjadi lebih tinggi;
- c. Penambahan dan revitalisasi trotoar, serta penambahan jalur sepeda sehingga meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan;
- d. Dinas Perhubungan Prov DKI Jakarta telah melaksanakan penanganan pada 38 titik kemacetan. Sejak tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2021 telah terdapat 108 titik kemacetan yang telah berhasil ditangani, sehingga target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kecepatan rata-rata di 41 koridor jalan utama pada jam sibuk terlampaui, yaitu 24,91 km/jam;
- e. Telah dilaksanakan kebijakan pembatasan lalu lintas yaitu penerapan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem Ganjil-Genap pada 25 ruas jalan utama di jam-jam sibuk, yaitu hari Senin-Jumat, pukul 06.00 - 10.00 WIB dan 16.00 - 21.00 WIB.

Beberapa strategi dan teknik manajemen lalu lintas yang telah dilaksanakan tersebut tentunya harus didukung dengan kemampuan personil aparat Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

minimal dapat memberikan bekal dan cara pandang bagaimana memecahkan permasalahan lalu lintas di perkotaan. Pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk memahami konsep lalu lintas, baik konsep dasar manajemen dan rekayasa lalu lintas, karakteristik lalu lintas dasar dan mampu mempraktekkan cara dan metoda pengumpulan data lalu lintas dengan bermacam-macam survei lalu lintas, inputing data, pengolahan data, sampai kepada menganalisis kinerja lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas. Kurikulum ini untuk mempersiapkan peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menjadi agen perubahan dalam menangani masalah lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta.

1. Pengantar Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Peserta dibekali dengan konsep manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengetahui strategi dan teknik yang sesuai diterapkan terhadap permasalahan lalu lintas.

2. Karakteristik Lalu Lintas Dasar (dasar dan operasional)

Peserta dibekali dengan karakteristik lalu lintas, seperti konsep volume lalu lintas, kecepatan lalu lintas, dan kepadatan lalu lintas.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Lalu Lintas

Peserta dibekali dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengolah data lalu lintas sesuai dengan survei lalu lintas.

4. Pengukuran Kinerja Lalu Lintas

Peserta dibekali dengan pemahaman dan kemampuan untuk menghitung beberapa indikator kinerja lalu lintas, seperti volume lalu lintas per kapasitas jalan, kecepatan lalu lintas, dan kepadatan lalu lintas.

Dengan memperhatikan semua aspek di atas, kurikulum pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat melengkapi peserta dalam perumusan rencana aksi upaya pencapaian target penurunan kemacetan. Kurikulum ini diharapkan mampu membekali para peserta dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemacetan di ruas dan persimpangan di Kota Jakarta.

D. TUJUAN KURIKULUM UMUM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami konsep lalu lintas, baik konsep dasar manajemen dan rekayasa lalu lintas, karakteristik lalu lintas dasar (volume lalu lintas, kecepatan lalu lintas, dan kepadatan lalu lintas). Peserta juga mampu mempraktekkan cara dan metoda pengumpulan data lalu lintas dengan bermacam-macam survei lalu lintas, inputing data, pengolahan data, sampai kepada menganalisis kinerja lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas.

E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami konsep manajemen dan rekayasa lalu lintas.
2. Memahami konsep Karakteristik Lalu Lintas Dasar.
3. Memahami dan mempraktekkan pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas.
4. Memahami konsep dan analisis kinerja lalu lintas
5. Mempraktekkan cara dan metoda pengumpulan data lalu lintas dengan bermacam-macam survei lalu lintas, inputing data, pengolahan data, sampai kepada menganalisis kinerja lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas.

F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

1. Materi pengantar manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - a. Kebijakan Umum Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pengantar Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - c. Pengantar Keselamatan Lalu Lintas.
2. Karakteristik Lalu Lintas Dasar (dasar dan operasional);
 - a. Karakteristik Jalan.
 - b. Karakteristik arus lalu lintas.
 - c. Hubungan volume, kecepatan dan kepadatan.
3. Materi Pengumpulan dan Pengolahan Data Lalu Lintas Kemiskinan;
 - a. Pengumpulan data dasar lalu lintas.
 - b. Pengolahan data dasar lalu lintas.
 - c. Praktek pengumpulan data dasar lalu lintas
 - d. Praktek Pengolahan data dasar lalu lintas.
4. Materi Pengukuran Kinerja Lalu Lintas.

G. KEPESERTAAN

Pegawai di unit kerja Dinas Perhubungan Prov DKI Jakarta, dengan beberapa persyaratan:

1. Diusulkan dan mendapat penugasan dari pimpinan satuan kerja di instansi terkait
 2. Pegawai yang ditugaskan dari masing-masing satuan kerja minimal merupakan pejabat eselon atau staf di bidang lalu lintas;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan mengikuti pelatihan lain.
- Jumlah peserta pada setiap angkatan pelatihan maksimal 30 orang.

H. MODEL PEMBELAJARAN

- Klasikal
- Pelatihan
- Lokakarya/ *Workshop*
- Bimbingan Teknis
- Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain)

- Non-klasikal
- e-learning*
- Pelatihan jarak jauh
- Coaching & mentoring*
- On the job training*
- Blended learning*

I. STRUKTUR PEMBELAJARAN

PELATIHAN ORIENTASI LALU LINTAS DAN ANGKATAN JALAN								
No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				TOTAL	Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap			
1	Mata Pelajaran Pokok	Pengantar Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9	-	-	9	3	
2		Karakteristik Lalu Lintas Dasar (dasar dan operasional)	9	-	-	9	4	
3		Pengumpulan dan Pengolahan Data Lalu Lintas	9	9	-	18	5	
4		Pengukuran Kinerja Lalu Lintas	9	5	-	14	6	
Total (1 s.d. 4)			50 JP					

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahu an	Keterampi lan	Sikap	TOTA L	
5	Ceramah Pimpinan		-	-	-	-	-
6	PKL		-	-	-	-	-
7	Outbound		-	-	-	-	-
8	MFD		-	-	-	-	-
9	Pengarahan Program		1	-	-	1	1
10	Building Learning Commitment		1	-	1	2	2
11	Forum Diskusi (CoP)		1	3	-	4	7
12	Coaching dan Mentoring		-	-	-	-	-
13	Action Learning		-	-	-	-	-
14	Lama waktu ujian (pre test dan post test)		8 JP				8
Total (5 s.d. 14)			15 JP				
TOTAL JP KESELURUHAN			65 JP				
DILAKSANAKAN DALAM							
Structured : 7 Hari							
Learning 7 Hari							
- TM							

Tahapan Kegiatan

Hari ke-	JP	Materi
1	TM 10 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan Program (1 JP) - BLC/Dinamika Kelompok (2 JP) - Pre Test (4 JP) - Sesi: Peraturan Perundangan (1) Permenhub No 96 Tahun 2013, (2) Perda Propinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 (3 JP)
2	TM 9 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Sesi: Pengantar Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (3 JP) - Sesi: Pengantar Keselamatan Lalu Lintas (3 JP) - Sesi: Karakteristik Jalan (3 JP)
3	TM 10 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Sesi: Karakteristik arus lalu lintas (3 JP) - Sesi: Hubungan volume, kecepatan dan kepadatan (3 JP) - Sesi: Pengumpulan data dasar lalu lintas (4 JP)
4	TM 10 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Sesi: Pengolahan data dasar lalu lintas (5 JP) - Sesi: Pengukuran kinerja lalu lintas (5 JP)

Hari ke-	JP	Materi
5	TM 10 JP	- Sesi: Pengukuran kinerja lalu lintas (4 JP) - Sesi: Praktek pengumpulan data dasar lalu lintas (6 JP)
6	TM 8 JP	- Sesi: Praktek pengolahan data dasar lalu lintas (3 JP) - Sesi: Praktek Pengukuran kinerja lalu lintas (5 JP)
7	TM 8 JP	- Sesi: Diskusi (4 JP) - Post test (4 JP)

J. KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar dapat berasal dari widyaiswara, pejabat atau pelaksana potensial yang ditugaskan dari OPD, pakar, praktisi maupun pejabat dari Kementerian/Lembaga dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam melakukan pengajaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Pejabat atau pelaksana potensial OPD yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya;
3. Pakar, praktisi maupun pejabat dari Kementerian/Lembaga maupun instansi nonpemerintah (lembaga riset, akademisi, dsb) yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya; dan/atau
Khusus untuk widyaiswara, telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)* kewidyaiswaraan.

K. EVALUASI

Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi & metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

Evaluasi Level 2

1. Pengetahuan, sikap dan perilaku dengan bobot 70% pada aspek manajemen dan rekayasa lalu lintas termasuk dalam disiplin, kerja sama, dan prakarsa selama pelaksanaan pelatihan;
2. Praktik dengan bobot 30% dilihat dari keterampilan mengumpulkan dan mengolah data manajemen rekayasa lalu lintas guna mengukur kinerja dasar lalu lintas dan angkutan.

Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan. Selain itu juga mengevaluasi kelancaran pengerjaan tugas dan fungsi setelah memiliki kompetensi dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dasar.

L. FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Ruang kelas, Ruang fasilitator;
2. Ruang makan, Ruang ibadah;
3. *Flipchart, White board;*
4. Laptop, printer, laser pointer, LCD Projector, *sound system;*
5. Kasus/Lembar Kerja;
6. *Post-it, meta plan;*
7. *Learning Management System (LMS);* dan Media pembelajaran lainnya.

M. INFORMASI LAIN-LAIN

1. Tahap *structured learning* akan dilaksanakan secara tatap muka;
2. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0089 Tahun 2024
Tanggal 22 Juli 2024

RENCANA PEMBELAJARAN
Pelatihan Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
1. Pengantar Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Peserta mampu memahami konsep manajemen dan rekayasa lalu lintas	Diskusi <i>(Terdapat Pre dan Post-test)</i>	Menjelaskan materi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Menyimak, bertanya, dan berdiskusi	6		
2. Karakteristik Lalu Lintas Dasar (dasar dan operasional)	Peserta mampu memahami konsep Karakteristik Lalu Lintas Dasar	Diskusi <i>(Terdapat Pre dan Post-test)</i>	Menjelaskan materi Karakteristik Lalu Lintas Dasar	Menyimak, bertanya, dan berdiskusi	8		

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Lalu Lintas	Peserta mampu memahami dan mempraktekkan pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas	Diskusi <i>dan</i> <i>latihan</i>	Menjelaskan materi Pengumpulan dan Pengolahan Data Lalu Lintas	Menyimak, bertanya, berdiskusi, dan praktek (latihan)	8	8	
4. Pengukuran Kinerja Lalu Lintas	Peserta mampu memahami konsep dan analisis kinerja lalu lintas	Diskusi dan latihan	Menjelaskan materi Pengukuran Kinerja Lalu Lintas	Menyimak, bertanya, berdiskusi, dan praktek (latihan)	8	2	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002